



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/576/Kum TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007/ tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Balangan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI BALANGAN,

The image shows the official seal of the Bupati of Balangan, which is a circular emblem featuring a Garuda (mythological bird) in the center, surrounded by the words "BUPATI BALANGAN" and a star. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

H. ANSHARUDDIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Sumber Data	Penanggung Jawab	
			Makna Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Perhitungan Indikator			
MISI I :								
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN								
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.	Untuk meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dsb.	variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
		2	Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak	<div><math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math><p>Keterangan:</p><div><div><math>HLS_a^t</math></div><div><math>E_i^t</math></div><div><math>P_i^t</math></div><div><math>i</math></div><div><math>FK</math></div></div><div><div>Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math></div><div>Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math></div><div>Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math></div><div>Usia (<math>a, a + 1, \dots, n</math>)</div><div>Faktor koreksi pesantren</div></div></div>	Dinas Pendidikan, BPS	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya kualitas kesehatan	3	Usia Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.	Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur, yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll	Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer).	<div><math display="block">AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 1000</math><p><math>D_{hamil}</math> : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran</p><p><math>JLH</math> : Jumlah Kelahiran Hidup</p></div>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

		5	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).	Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.	$AKB = \frac{\sum K_{0- < 1th}}{\sum Kelahiran Hidup} \times 1000$ <p>Dimana,</p> $K_{0- < 1th} = \text{Kematian bayi usia di bawah 1(satu) tahun}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		6	Prevalensi Kekurangan Gizi	Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score < - 3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, dan marasmus-kwasiorakor)	Balita gizi kurang adalah balita yang hasil penimbangannya berada di bawah garis merah pada kartu menuju sehat (KMS)	Jumlah Balita dengan status gizi kurang/buruk x 100%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis	7	Prosentase perselisihan hubungan industrial	Melindungi Hak-hak tenaga kerja yang bekerja	Terlindunginya hak-hak tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	Jumlah kasus yang diselesaikan / Jumlah kasus yang tercatat x 100%	Disnakertran, BPS	Dinsosnakertran

MISI II :

MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN

4	Meningkatnya investasi daerah	8	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Rp)	Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN ( Penanaman Modal Dalam Negeri)	Untuk Mengetahui capaian kerja kinerja pertahun	Jumlah nilai investasi (Rp)	Penanaman Modal	KP2TPM
		9	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Realisasi Investasi yang terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Untuk Mengetahui persentase capaian kerja kinerja pertahun	Realisasi Investasi x 5%	Penanaman Modal	KP2TPM
5	Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur pereekonomian daerah	10	Persentase pertumbuhan IKM	IKM yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan sumber daya alam	IKM yang memiliki kompetensi inti daerah sebagai salah satu syarat menghasilkan produk unggulan daerah	Jumlah produk IKM th N (yg di fasilitasi)	Bidang Perindustrian	Diskoperind
		11	Persentase rata - rata peningkatan aset Koperasi per tahun	Harta kekayaan yang dimiliki oleh koperasi	Untuk meningkatkan aset koperasi	Jumlah agregat nilai koperasi pada tahun N - Nilai aset pada tahun N-1 dibagi Jumlah nilai aset tahun N-1 x 100%	Bidang Koperasi dan UK/M	Diskoperind
		12	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi yg aktif dalam melakukan kegiatan usaha	Karena dengan bertambahnya aset menggambarkan keberhasilan koperasi sebagai badan usaha	Dari laporan RAT koperasi	Bidang Koperasi dan UK/M	Diskoperind
6	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	13	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun)	Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.	Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.000 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari	Persentase Peningkatan skor PPH Ketersediaan	Ketapang	Ketapang
		14	Tingkat Konsumsi Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;	Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari	Persentase Peningkatan Skor PPH Konsumsi	Ketapang	Ketapang

MISI III :								
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN								
7	Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi	15	Persentase jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan	$\frac{Panjang\ jalan\ kabupaten\ dalam\ kondisi\ baik}{Total\ panjang\ jalan\ kabupaten} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Binamarga
		16	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten	Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur Jalan	$\frac{Panjang\ jembatan\ dalam\ kondisi\ baik}{Total\ panjang\ jembatan\ kabupaten} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Binamarga
8	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih	17	Persentase kinerja sistem irigasi	Pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi	$\frac{Ketersediaan\ air\ irigasi-\frac{lt}{det}\ pada\ setiap\ musim\ tanam}{Kebutuhan\ air\ irigasi-\frac{lt}{det}\ berdasarkan\ rencana\ tata\ tanam} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air
		18	Persentase penanganan daya rusak air	Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air	Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan daya rusak air	$\frac{Jumlah\ panjang\ sungai\ rawan\ bencana\ yang\ tertangani}{Total\ panjang\ sungai\ rawan\ bencana} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air
9	Meningkatnya prasarana dan sarana perumahan dan fasiliitas umum	19	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	Meningkatkan kualitas layanan air minum	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum	$\frac{Masyarakat\ yang\ terlayani\ (jiwa)}{Total\ masyarakat\ di\ seluruh\ kabupaten\ (jiwa)} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		20	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Meningkatkan kualitas pelayanan air limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sistem air limbah	$\frac{Jumlah\ penduduk\ yang\ terlayani\ tangki\ septik/MCK}{Jumlah\ total\ penduduk\ seluruh\ kabupaten} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		21	Persentase luas genangan	Meningkatkan kualitas drainase permukiman	Meningkatkan pelayanan infrastruktur drainase	Luas daerah masih tergenang/Total luas daerah tergenang X 100%	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
		22	Persentase rumah layak huni	Peningkatan rumah layak huni	Untuk meningkatkan jumlah layak huni dengan kegiatan bedah rumah	Perbandingan rumah layak huni dengan jumlah rumah seluruhnya kali 100 %	Perkim	Perkim
10	Tersedianya prasarana fasilitas publik yang memadai	23	Persentase bangunan publik yang layak pakai	Meningkatkan ketersediaan fasilitas publik bagi warga masyarakat	Meningkatkan kualitas bangunan publik yang sesuai standar	$\frac{Jumlah\ bangunan\ publik\ yang\ layak\ pakai}{Total\ kebutuhan\ bangunan\ publik} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
11	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	24	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah	Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	Percepatan penyelesaian norma, standar, prosedur dan kriteria tentang rencana tata ruang wilayah	$\frac{Jumlah\ peta\ analog/digital\ rencana\ tata\ ruang\ yang\ tersedia}{Total\ peta\ analog/digital\ rencana\ tata\ ruang\ yang\ harus\ tersedia} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang
		25	Persentase tersedianya luasan RTH	Meningkatkan ketersediaan RTH	Penyediaan dan pembangunan RTH publik	$\frac{Luasan\ RTH\ publik\ yang\ tersedia}{Luasan\ RTH\ publik\ yang\ seharusnya\ pada\ perkotaan} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang
MISI IV :								
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL								
12	Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian	26	Produksi Tanaman Pangan (ton)	Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai	Mendukung swasembada pangan nasional	Jumlah produksi padi, jagung dan kedelai per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
		27	Produksi Hortikultura (ton/Ha)	Peningkatan produksi sayuran dan biofarma	Penyesuaian program dengan kementerian dan dinas propinsi	Jumlah produksi sayuran dan biofarma per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian

				Peningkatan produksi buah dan tanaman hias	Produk unggulan daerah	Jumlah produksi buah dan tanaman hias per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
		28	Swasembada daging (Kg)	Jumlah produksi daging terhadap kebutuhan masyarakat	Untuk mengetahui ketersediaan, kebutuhan dan kecukupan protein hewani masyarakat	Kebutuhan Kg per kapita per tahun	Pertanian	Pertanian
		29	Produksi Perkebunan (Ton)	Peningkatan hasil produksi perkebunan	Luas lahan perkebunan hampir 30% dari luas kabupaten Balangan dan merupakan sentra kawasan karet	Jumlah produksi per tahun (ton)	Pertanian	Pertanian
13	Pemanfaatan sumber daya alam bidang perikanan	30	Produksi Ikan (ton/tahun)	Jumlah semua hasil budidaya dan penangkapan ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan dan ditangkap dari sumber perikanan alami baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan dalam satuan ton	Untuk peningkatan budidaya dan produksi perikanan	<i>Jumlah produksi ikan berdasarkan satuan tertentu (kg/ton) dan merupakan penjumlahan anantara produksi perikanan tangkap dengan produksi perikanan budidaya selama kurun waktu tertentu (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)</i>	Perikanan	Perikanan
		31	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	Jumlah ikan yang dikonsumsi tiap - tiap orang di Kabupaten Balangan per tahun dalam kilogram	Untuk mengetahui perkembangan tingkat konsumsi ikan di dalam masyarakat	<i>Jumlah konsumsi ikan per-kapita tahun n dikurang Jumlah konsumsi ikan per-kapita tahun (n-1) dibagi Jumlah konsumsi ikan per-kapita tahun n dikali 100%</i>	Perikanan	Perikanan
14	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	32	Jumlah kunjungan wisata	Potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata	Daya tarik tujuan wisatawan	( Jumlah kunjungan tahun N-1 ) / ( Jumlah kunjungan tahun N ) x 100%	Pariwisata	Pariwisata
15	Meningkatnya luas kawasan produktif transmigrasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat	33	Prosentase luas kawasan transmigrasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dengan bertambahnya luas kawasan produktif transmigrasi maka akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrasi	Semakin luas kawasan produktif yang dikelola oleh transmigran akan menambah pendapatan masyarakat transmigrasi dan PAD dari sektor pertanian juga akan meningkat	Luas lahan produktif yang telah dibuka / Luas kawasan transmigrasi x 100%	Disnakertrans	Disnakertrans

**MISI V :**

**MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN**

16	Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	34	Prosentase Angka PMKS	Mengindikasi jumlah PMKS tiap tahun	Angka merupakan indikator yang jelas untuk menunjukan data / jumlah PMKS pada tahun n	Angka PMKS = (Σ PMKS Tahun (n-1) - Σ PMKS tahun (n) x 100 %	Dinsos	Dinsos
17	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama	35	Angka konflik kosial yang bernuansa sara yang terjadi di Kabupaten Balangan	Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik.	Untuk menghindari konflik di kalangan umat beragama	Jumlah konflik	Kesbang	Kesbang
18	Tewujudnya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	36	Rasio kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	Meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana	Rendahnya kapasitas masyarakat tentang kebencanaan	Jumlah komunitas mayarakat penanggulangan yang dibina / Jumlah komunitas masyarakat penangulangan bencana pada daerah rawan bencana x 100%	BPBD	BPBD
19	Terwujudnya penanganan darurat bencana	37	Persentase penanganan bencana	penanganan kedaruratan bencana yang efektif	Kewajiban penanganan bencana	Jumlah bencana yang ditangani / Jumlah kejadian bencana x 100%	BPBD	BPBD
20	Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik	38	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel	Untuk pemulihan pasca bencana	Jumlah objek terdampak yang ditangani / Jumlah keseluruhan terdampak x 100%	BPBD	BPBD

21	Meningkatkan pembinaan kepemudaan	39	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan seperti karang taruna, Pramuka, dan lainnya	Untuk menggalakkan kegiatan kepemudaan dan olahraga bagi para pemuda dalam rangka menyalurkan kegiatan secara positif dan bermanfaat	Jlh organisasi kepemudaan aktif yang dibina /jml organisasi kepemudaan di Kab. Balangan x 100%	Kepemudaan	Dispora
22	Meningkatkan pembinaan olahraga	40	Jumlah cabang olahraga berprestasi	Meningkatkan jenis dan cabang olahraga unggulan dan andalan balangan dalam pekan olahaga daerah		Jlh cabang olahraga prestasi di event prov atau nasional/jmh cabang prestasi x 100%	Olahraga	Dispora
MISI VI :								
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH								
23	Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat	41	Persentase jaringan dan infrstruktur e-government	Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government	Untuk meningkatkan kemampuan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui sistem online	Jumlah penerapkan egovernment/aplikasi pemerintah x 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kominfo
24	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	42	Indeks kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (%)	Penilaian terhadap pelayanan publik menyangkut segala aspek mencakup sistem, prosedur dan metode dalam memenuhi hak-hak publik, baik sebagai penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik.	Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Pengolahan data nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Karena itu untuk pengolahan data dilakukan dengan cara: a. Membuat scoring/nilai persepsi untuk setiap alternatif jawaban (x) sebagai berikut : alternatif jawaban 'a' diberi nilai 1, 'b' diberi nilai 2, 'c' diberi nilai 3 dan 'd' diberi nilai '4'. b. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus : Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot = 1 = 0,071 jumlah unsur 14 c. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total Unsur yang terisi d. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM Unit Pelayanan X 25	SKPD Pelayanan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	43	Opini BPK atas LKPD	Opini wajar tanpa pengecualian (WTP = unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (WDP = qualified opinion), menolak memberikan opini (disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opnion).	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.	Rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan rumus : ( Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan ) / ( Jumlah Total Rekomendasi BPK RI ) X 100%	Inspektorat	Inspektorat
		44	Nilai EKPPD Kabupaten	Sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah merupakan kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan	Sumber Informasi Ekppd Dan Tim Penilai	Bag. Pemerintahan	Setda



		45	Nilai HE-SAKIP Kabupaten	Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.	Untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	HE-AKIP Kabupaten dari Kemapan RB	Bag. Organisasi	Inspektorat/Setda
MISI VII :								
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF								
26	Menurunnya angka pelanggaran ketertiban masyarakat	46	Angka pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	Menegakan peraturan daerah	Untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ("Perda") dan/atau peraturan kepala daerah.	Jumlah pelanggaran perda = 0	Satpol PP	Satpol PP
27	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	47	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Rata-rata prosentase pelayanan dokumen kependudukan yang meliputi prosentase kepemilikan kartu keluarga, prosentase kepemilikan KTP-el, prosentase kepemilikan akta kelahiran, prosentase kepemilikan akta kematian dan prosentase kepemilikan akta perkawinan	Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk	Jumlah prosentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (: ) jumlah jenis pelayanan	DUKCATPIL	DUKCATPIL

Paringin, 5 September 2017  
BUPATI BALANGAN  
H. ANSHARUDDIN